

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sasaran rencana pembangunan nasional adalah pembangunan disegala bidang dan mencakup seluruh sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan angka pengangguran dapat dicapai bila seluruh komponen masyarakat yang berusaha diberbagai sektor mendorong upaya tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Dikarenakan penduduk bertambah terus menerus dan berarti kebutuhan ekonomi juga terus bertambah, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Pembangunan mencakup pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih setara, kesetaraan gender yang lebih besar, kesehatan dan nutrisi yang lebih baik, serta kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama terlibat aktif dengan menggunakan potensi-potensi yang ada untuk membangun perekonomian daerah.

Didalam konteks pembangunan regional, investasi memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi

dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000:367).

Investasi atau penanaman modal sangat diperlukan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Iklim investasi juga dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi suatu negara atau daerah. Kondisi inilah yang mampu menggerakkan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi.

Secara umum investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut terhadap investasi, dan adanya iklim investasi yang kondusif. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Krisis moneter yang mengguncang iklim usaha (ekonomi) nasional sekitar tahun 1997 di Indonesia semakin menyadarkan banyak pihak akan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat. Sebuah paradigma pembangunan yang tidak memutlakkan dasar pertumbuhan pada peran penguasa-penguasa ekonomi, melainkan pada semua pihak terutama pada peran ekonomi rakyat.

Keputusan politik pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001, telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi Daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan Pemerintahan yang sentralistik birokratis ke arah desentralistik partisipatoris.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggung jawab pada Daerah Kabupaten dan Kota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan lebih jauh diharapkan akan menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah.

Undang-undang ini kemudian direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional negara Republik Indonesia dan pemberlakuan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan bisa memotivasi peningkatan kreatifitas dan inisiatif untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah, dan dilakukan secara terpadu, serasi, dan terarah agar pembangunan disetiap daerah dapat benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian

daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu : (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Setiap daerah otonom memiliki keleluasaan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam daerah yang dapat dijadikan sebagai andalan dalam pengembangan ekonomi secara umum. Dalam pengembangan aset sumber daya alam di daerah, diperlukan adanya anggaran atau dana dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam, agar pengembangannya dapat berjalan sesuai dengan rencana pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang optimal.

Untuk mendorong penyelenggaraan otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi tersebut, salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah dengan mendorong para investor baik investor lokal maupun investor asing untuk melakukan investasi di Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan diharapkan memberikan peningkatan pendapatan bagi daerah serta mampu mengurangi tingkat pengangguran di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Permasalahan nasional dalam suatu negara yang sedang membangun diantaranya, yaitu kesempatan kerja dan pendapatan perkapita. Seperti halnya di tingkat nasional, masalah ketenagakerjaan dan PDRB di Propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu masalah pokok yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Perkembangan investasi di Propinsi Nusa Tenggara Timur cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di mana pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan perbaikan dari keadaan minus 13.68% tahun 1998 menjadi positif pada tahun 2000 yaitu 4.77% dan terus mengalami peningkatan. Namun, pertumbuhan ekonomi agak pincang dikarenakan hanya digerakkan oleh meningkatnya konsumsi masyarakat dan pemerintah bukan akibat peningkatan investasi dan ekspor. Oleh karena itu kedepan peningkatan investasi dan ekspor menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja. Perkembangan investasi secara nasional terus mengalami hingga tahun 2005 telah di setujui 2.399 proyek PMDN dengan nilai investasi Rp. 459,5 triliun dan proyek PMA dengan nilai investasi US\$ 115,5 Milyard. Dari persetujuan ini tingkat realisasi secara nasional sebanyak 681 proyek PMDN (30.53%) dengan nilai investasi sebesar Rp. 38,9 triliun (8,56%) sedangkan PMA sebanyak 3.643 proyek (36,00%) dengan nilai investasi sebesar US\$ 27 Milyard (25%).

Perkembangan investasi di Propinsi Nusa Tenggara Timur periode sampai dengan 2005 adalah berjumlah 64 perusahaan yaitu 30 proyek PMDN sengan rencana investasi Rp.4.609.065.765.500 dan realisasi sebesar 192.930.160.149,-. Sedangkan untuk proyek PMA 34 Proyek dengan rencana investasi US\$ 309.286.047 dan realisasi sebesar US\$ 34.765.140. Sudah tentu peningkatan investasi ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan per kapita di Propinsi Nusa Tenggara Timur. (www.nttprov.go.id/bkpm�/web/index.php?hal=k_inves, 2005)

1.2 Rumusan Masalah

Dalam kaitannya dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengaruh tingkat investasi atau penanaman modal asing dan tingkat investasi atau penanaman modal dalam negeri terhadap kesempatan kerja dan PDRB di Propinsi Nusa Tenggara Timur?

Penelitian tentang pengaruh investasi terhadap pembangunan ekonomi akan mengambil unit analisis pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan periode pengamatan runtun waktu (*time series*) 20 tahun dari tahun 1991-2010.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pengaruh tingkat investasi atau penanaman modal asing dan tingkat investasi atau penanaman modal dalam negeri terhadap kesempatan kerja dan PDRB di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan ini, mampu memberikan manfaat yang antara lain adalah :

1. Sebagai informasi dan bahan masukan bagi Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan dan perkembangan investasi ke arah membuka kesempatan kerja yang lebih luas.

2. Dapat memberikan gambaran bagaimana kontribusi tingkat investasi terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PDRB di Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Sebagai informasi ilmiah dan wawasan ilmu pengetahuan tentang pengaruh investasi terhadap penyediaan kesempatan kerja dan peningkatan PDRB di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan pembahasan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan teori – teori yang akan digunakan sebagai acuan dalam membahas dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga ini mengenai ruang lingkup dan obyek penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, teknik dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab keempat ini berisi mengenai perhitungan untuk permasalahan dalam penelitian ini dan pembahasan dari hasil yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN

Merupakan bagian terakhir, dan di dalamnya memuat kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

